



ETIKA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI JAWA TENGAH

Sugiyatno¹, Rapiudin², Siti Nur Lailatul Falah³ dan Aldi Firdaus⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

sugiyatnoici15@gmail.com

Abstrak

Etika birokrasi memainkan peran yang penting dalam peningkatan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah. Pada saat yang sama, kepercayaan investor menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika birokrasi dan kepercayaan investor di provinsi Jawa Tengah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi etika birokrasi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, investor, dan pihak terkait lainnya di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika birokrasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan investor. Etika birokrasi yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Selain itu, komitmen pemerintah dan dukungan kebijakan yang konsisten juga ditemukan berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Kata kunci: Etika birokrasi, kepercayaan investor, Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Bureaucratic ethics plays an important role in increasing investor confidence in Central Java province. At the same time, investor confidence is a key factor in regional economic growth. This study aims to analyze the relationship between bureaucratic ethics and investor confidence in Central Java province, as well as to identify factors that influence bureaucratic ethics that can increase investor confidence. This research uses a qualitative method by conducting in-depth interviews with government officials, investors, and other related parties in Central Java province. The results of the study show that strong bureaucratic ethics is a key factor in building and maintaining investor confidence. Good bureaucratic ethics is reflected in the principles of transparency, accountability, fairness and professionalism. In addition, consistent government commitment and policy support were also found to play an important role in creating a conducive business environment.

Keywords: *bureaucratic ethics, investor confidence, Central Java province*



PENDAHULUAN

Etika birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor di suatu daerah. Birokrasi yang memiliki etika yang baik akan memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan efektif kepada investor. Hal ini akan membuat investor merasa nyaman dan yakin untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Menurut pakar filsafat Mesir yang tersohor, Ahmad Amin (1983: 3), etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Etika birokrasi adalah konsep yang mencakup seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku birokrat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Etika birokrasi melibatkan pertimbangan moral dan profesional dalam pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Etika birokrasi yang kuat berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan bebas korupsi. Dalam konteks peningkatan kepercayaan investor, etika birokrasi menjadi kunci dalam membangun iklim investasi yang positif dan menarik bagi investor.

Etika birokrasi dalam pelayanan publik adalah suatu cara atau tata cara yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Etika birokrasi dalam pelayanan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip moralitas, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kesederhanaan. Etika birokrasi dalam pelayanan publik juga harus

memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Etika birokrasi juga berperan dalam mengurangi praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan investor. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana etika birokrasi dapat diterapkan dan ditingkatkan di Jawa Tengah menjadi sangat relevan dalam konteks meningkatkan kepercayaan investor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006: 04).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran etika birokrasi dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah.

Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini terdapat 4 narasumber yang terlibat didalamnya, diantaranya: Kepala Dinas BAPEDA, Kepala Dinas KOMINFO, Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam penelitian kali ini subjek pendukung ialah Ir. Sakina Rosellasari, M.Si, M.Sc, karena pada hal ini Etika Birokrasi menjadi persoalan utama dalam pembahasan ini,

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh



peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di gedung aula Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, etika birokrasi dalam meningkatkan investor di Jawa Tengah ini merupakan suatu hal yang utama, dimana para pegawai mampu melaksanakan etika birokrasi dengan apa yang sudah tertulis agar terlaksananya layanan yang mudah, murah, cepat dan tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada peran etika birokrasi dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah. Hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait dan analisis data sekunder menjadi dasar untuk memahami hubungan antara etika birokrasi dan kepercayaan investor. Beberapa tema utama yang muncul dalam pembahasan ini termasuk transparansi, akuntabilitas, integritas, dan peran pemerintah daerah.

Pembahasan ini menekankan peran pemerintah daerah dalam mempromosikan etika birokrasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan investor, pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif, dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja birokrasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat juga penting untuk membangun komunikasi yang baik dan memperkuat kepercayaan.

Etika Birokrasi Dalam Peningkatan Investor di Jawa Tengah

Jawa Tengah, salah satu provinsi di Indonesia, telah menarik perhatian banyak investor dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan suatu daerah dalam menarik investasi sangat tergantung pada kepercayaan investor terhadap lingkungan bisnis dan birokrasi yang ada. Etika birokrasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan, efisien, dan akuntabel bagi investor.

Dalam konteks Jawa Tengah, di mana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan investasi, penelitian tentang etika birokrasi menjadi relevan. Etika birokrasi merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Sebuah birokrasi yang etis dianggap memiliki kualitas seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas. Keberadaan etika birokrasi yang kuat dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa proses bisnis mereka akan ditangani dengan adil dan tanpa praktik korupsi.

Pentingnya etika birokrasi dalam konteks peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah tidak dapat diabaikan. Investasi yang berhasil membutuhkan lingkungan yang transparan di mana investor memiliki akses yang mudah ke informasi terkait prosedur bisnis dan regulasi.

Transparansi dalam birokrasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Lingkungan bisnis yang transparan memberikan investor akses yang mudah terhadap informasi terkait prosedur bisnis, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks Jawa Tengah, transparansi



dalam birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keadilan dan kesetaraan perlakuan dalam proses bisnis. Dalam pembahasan ini, ditemukan bahwa upaya meningkatkan transparansi birokrasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti penerapan sistem informasi yang terbuka dan publikasi yang jelas tentang kebijakan dan prosedur.

Integritas birokrasi juga menjadi fokus dalam pembahasan. Integritas mencakup sikap jujur, adil, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan keputusan. Praktik korupsi dan nepotisme dapat merusak kepercayaan investor. Dalam pembahasan ini, ditemukan bahwa peningkatan integritas birokrasi dapat dilakukan melalui penerapan kode etik yang kuat, pelatihan dan kesadaran akan pentingnya integritas, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran etika.

Kepercayaan Investor

Kepercayaan investor merujuk pada keyakinan dan kepercayaan investor terhadap lingkungan bisnis dan birokrasi suatu daerah. Kepercayaan investor mencakup keyakinan bahwa investasi mereka akan dikelola dengan baik, proses bisnis akan adil dan transparan, dan hak-hak mereka akan dihormati. Kepercayaan investor sangat penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi membutuhkan tingkat kepercayaan yang kuat dari investor terhadap lingkungan bisnis yang ada.

Peningkatan Kepercayaan Investor melalui Etika Birokrasi

Etika birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Lingkungan bisnis yang didasarkan pada

etika birokrasi yang kuat menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Investor cenderung lebih percaya dan yakin bahwa kepentingan mereka akan dilindungi dan proses bisnis akan berjalan dengan adil. Etika birokrasi juga membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang sering kali menjadi hambatan bagi kepercayaan investor. Dengan menerapkan etika birokrasi yang baik, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan berkelanjutan bagi investor.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Birokrasi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik etika birokrasi. Pertama, kepemimpinan yang baik dan berintegritas di dalam birokrasi merupakan faktor kunci. Para pemimpin birokrasi harus mempraktikkan nilai-nilai etika dan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga berperan penting dalam membangun etika birokrasi yang kuat. Sistem insentif dan sanksi yang tepat juga dapat mempengaruhi perilaku birokrat dalam melaksanakan tugas mereka.

Etika birokrasi dalam konteks investasi

Etika birokrasi dalam konteks investasi adalah suatu cara atau tata cara yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan kepada investor. Etika birokrasi dalam konteks investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip moralitas, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kesederhanaan. Etika birokrasi dalam konteks investasi juga harus memperhatikan kepentingan



investor dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam penelitian ini, tinjauan teori tentang etika birokrasi dan kepercayaan investor digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis peran etika birokrasi dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah. Dengan memahami konsep-konsep ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan etika birokrasi dan memperkuat kepercayaan investor di wilayah tersebut.

Akuntabilitas birokrasi juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan investor. Investor ingin memiliki keyakinan bahwa birokrasi akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, pembahasan ini menyoroti perlunya adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, seperti pengawasan internal dan eksternal, serta kemampuan investor dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi ketidakpatuhan atau penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi kebijakan dan prosedur yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalkan risiko praktik korupsi.

Dengan pembahasan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika birokrasi berperan penting dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah. Transparansi, akuntabilitas, integritas, dan peran pemerintah daerah merupakan faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam upaya memperkuat etika birokrasi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan etika birokrasi, diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi lingkungan investasi yang menarik, terpercaya, dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi di Provinsi Jawa Tengah memerlukan dukungan dari birokrasi yang beretika dalam memberikan pelayanan kepada investor. Etika birokrasi diartikan sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mengatur perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugasnya. Etika birokrasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepercayaan kepada investor.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi investasi yang besar. Namun, untuk menarik lebih banyak investor, pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kualitas birokrasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan etika birokrasi yang baik dalam pelayanan kepada investor.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan etika birokrasinya dalam pelayanan kepada investor antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan. Investor perlu dapat mengakses informasi yang akurat tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur investasi di provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Investor perlu dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan mudah tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.
3. Meningkatkan efektivitas dalam pelayanan. Investor perlu dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dan dapat memberikan manfaat yang maksimal baginya.



Dengan menerapkan etika birokrasi yang baik, pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi ke provinsi Jawa Tengah. Hal ini akan dapat meningkatkan perekonomian provinsi Jawa Tengah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Berikut adalah beberapa contoh etika birokrasi yang dapat diterapkan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan kepada investor:

1. Petugas birokrasi harus bersikap profesional dan objektif dalam memberikan pelayanan.
2. Petugas birokrasi harus menghindari konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan.
3. Petugas birokrasi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh investor.
4. Petugas birokrasi harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.
5. Petugas birokrasi harus bersikap ramah dan sopan kepada investor.

Dengan menerapkan etika birokrasi yang baik, pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di provinsi Jawa Tengah. Hal ini akan dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan perekonomian provinsi Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika birokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah. Transparansi,

akuntabilitas, dan integritas birokrasi menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mengurangi risiko korupsi. Investasi yang berhasil membutuhkan lingkungan yang transparan di mana investor memiliki akses yang mudah ke informasi terkait prosedur bisnis dan regulasi.

2. Kepercayaan investor merupakan faktor kunci yang memengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Etika birokrasi yang kuat dapat membangun kepercayaan investor dengan memberikan kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan kebijakan yang konsisten. Dalam konteks Jawa Tengah, upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor harus berfokus pada memperkuat transparansi birokrasi, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas dan keputusan.
3. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mempromosikan etika birokrasi dan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan investor, melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja birokrasi. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat juga penting untuk membangun komunikasi yang kuat dan memperkuat kepercayaan.
4. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan



terkait tentang bagaimana meningkatkan etika birokrasi dalam rangka memperkuat kepercayaan investor di Jawa Tengah. Implementasi langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta peran pemerintah daerah yang aktif akan membawa dampak positif pada iklim investasi dan daya tarik Jawa Tengah sebagai tujuan investasi.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya etika birokrasi dalam peningkatan kepercayaan investor di Jawa Tengah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas birokrasi menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mempromosikan etika birokrasi melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan investor. Dengan implementasi langkah-langkah yang tepat, diharapkan Jawa Tengah dapat menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan dan memperkuat

kepercayaan investor dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/943/Etika-Birokrasi>
<https://eprints.unmer.ac.id/309/1/Etika%20Birokrasi%20Dalam%20Pelayanan%20Publik.pdf>
<https://jatengprov.go.id/publik/era-ganjar-investasi-jateng-berkembang-pesat/>
<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-masuk-lima-besar-nominasi-layanan-investasi-2022/>
<https://id.scribd.com/doc/39019178/etika-birokrasi>
<http://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook%20BUKU%20ETIKA%20PEMERINTAHAN.pdf>
Rian Destiningsih^(1*) 2019 “Analisis Potensi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Tahun 2010-2016)”
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1343> diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 11:28 WIB

